



**KLASIFIKASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS
MASA SIDANG II TAHUN 2010 – 2011**

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
BIDANG POLKAM					
1.	RUU tentang Intelijen	DPR	KOMISI I	PANJA	Harmonisasi RUU
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	KOMISI I	PANJA	Pasal krusial : 1. Klasifikasi dan Jenis informasi yang merupakan hak publik 2. Tingkatan informasi yang dapat disampaikan
3.	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan		KOMISI I	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 29 Juli 2010	
4.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Teknik Militer		KOMISI I	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 21 September 2010	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR	PANSUS	Disahkan menjadi RUU Usul inisiatif DPR RI tanggal 13 Desember 2010	Usul inisiatif DPR RI

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR	KOMISI II	Belum ada pembahasan	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR	PANSUS	Disahkan menjadi Undang-Undang Pada tanggal 16 Desember 2010	
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	PANSUS	Belum ada pembahasan	
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR		Pembicaraan Tingkat I	
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	PANSUS	Belum ada pembahasan	
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	DPR	PANSUS	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 26 Oktober 2010	
12.	RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	DPR		Belum ada pembahasan	
13.	RUU tentang Konvergensi Telematika	PEMERINTAH		Belum ada pembahasan	
14.	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	PEMERINTAH		Belum ada pembahasan	

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
15.	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	PEMERINTAH	KOMISI I	Pembicaraan Tingkat I	
16.	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH	KOMISI II	Belum ada pembahasan	
17.	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH	KOMISI II	Belum ada pembahasan	
18.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	KOMISI III	Belum ada pembahasan	
19.	RUU tentang Pencabutan PERPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		KOMISI III	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 25 Mei 2010	
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	PEMERINTAH	KOMISI III	Sudah di sahkan menjadi Undang-Undang tanggal 26 Juli 2010	
21.	RUU tentang Keimigrasian	PEMERINTAH	KOMISI III	Pembicaraan Tingkat I	
22.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	KOMISI III	Belum ada pembahasan	
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	KOMISI II	Belum ada pembahasan	

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
24.	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH	KOMISI II	Belum ada pembahasan	
25.	RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	PEMERINTAH	KOMISI III	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 5 Oktober 2010	
26.	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR	KOMISI III	Pembicaraan Tingkat I	
27.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	KOMISI III	Pembicaraan Tingkat I	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	KOMISI III	Pembicaraan Tingkat I	
BIDANG INBANG					
29.	RUU tentang Kelautan	PEMERINTAH	KOMISI IV	Belum ada pembahasan	
30.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	PEMERINTAH	KOMISI IV	Belum ada pembahasan	
31.	RUU tentang Hortikultura	DPR	KOMISI IV	Disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 26 Oktober 2010	
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman	DPR	KOMISI V	Pembicaraan Tingkat I akan disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 17 Desember 2010	

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	KOMISI V	RDPU/Forum Group Discusion	
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR	KOMISI V	Panja	
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR	KOMISI V	RDPU/FGD	
36.	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR	KOMISI VI	Harmonisasi oleh Baleg	
37.	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	DPR	KOMISI VI	Harmonisasi oleh Baleg	
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	DPR	KOMISI VI	Harmonisasi oleh Baleg	
39.	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH	KOMISI VI	Belum ada pembahasan	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	PEMERINTAH	KOMISI VI	Belum ada pembahasan	
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	PEMERINTAH	KOMISI VI	Pembicaraan Tingkat I	
42.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH	KOMISI VI	Belum ada pembahasan	

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
43.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	PEMERINTAH	KOMISI VI	Belum ada pembahasan	
BIDANG EKKU					
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	KOMISI VII	Belum ada pembahasan	
45.	RUU tentang Informasi Geospasial	PEMERINTAH	KOMISI VII	Pembicaraan Tingkat I	
46.	RUU tentang Keantariksaan	PEMERINTAH	KOMISI VII	Belum ada pembahasan	
47.	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	KOMISI XI	Pembicaraan Tingkat I	
48.	RUU tentang Mata Uang	DPR	KOMISI XI	Pembicaraan Tingkat I	
49.	RUU tentang Perekonomian Nasional/Demokrasi Ekonomi	DPR	KOMISI XI	Belum ada pembahasan	
50.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH	KOMISI XI	Belum ada pembahasan	
51.	RUU tentang Transfer Dana	PEMERINTAH	KOMISI XI	Pembicaraan Tingkat I	

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
52.	RUU Akuntan Publik	PEMERINTAH	KOMISI XI	Pembicaraan Tingkat I	
53.	RUU Tentang APBN TA 2011	PEMERINTAH	BADAN ANGGARAN	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 26 Oktober 2010	
54.	RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2008	PEMERINTAH	BADAN ANGGARAN	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 4 Maret 2010	
55.	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2010	PEMERINTAH	BANDAN ANGGARAN	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 3 Mei 2010	
56.	RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009	PEMERINTAH	BADAN ANGGARAN	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 31 Agustus 2010	
BIDANG KESRA					
57.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan shodaqoh	DPR	KOMISI VIII	Pembicaraan Tingkat I	
58.	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH	KOMISI VIII	Belum ada pembahasan	
59.	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	KOMISI VIII	Pembicaraan Tingkat I	
60.	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	KOMISI VIII	Pemerintah dan MUI belum menemui titik temu mengenai produk halal	Pembahasan akan dilakukan jika Pemerintah dan MUI sudah menemukan titik temu

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
61.	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH	KOMISI VIII	Belum ada pembahasan	
62.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	KOMISI IX	PANJA	Saat ini persiapan penyusunan pandangan fraksi
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DPR	KOMISI IX	Belum ada pembahasan	
64.	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional	DPR	KOMISI IX	Pembicaraan Tingkat I	
65.	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	KOMISI IX	Sudah disahkan dalam Rapat Paripurna dari Usul Inisiatif Komisi IX menjadi RUU DPR RI untuk selanjutnya dibahas menjadi Undang-Undang	
66.	RUU tentang Keperawatan	DPR	KOMISI X	Belum ada pembahasan	
67.	RUU tentang Gerakan Pramuka	DPR	KOMISI X	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 26 Oktober 2010	
68.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	KOMISI IX	Belum ada pembahasan	
69.	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR	KOMISI IX	Belum ada pembahasan	
70.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	DPR	KOMISI X	Sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 26 Oktober 2010	
71.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH	KOMISI IX	Belum ada pembahasan	

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
72.	RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan	PEMERINTAH	KOMISI VIII	Belum ada pembahasan	
73.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	PEMERINTAH	KOMISI III	Belum ada pembahasan	

NON RUU

NO	NON RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN	PEMBAHAS	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Keterbukaan Informasi Publik		KOMISI I	Belum ada pembahasan	
2.	Memproses Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik		KOMISI XI	Belum ada pembahasan	
3.	Tim Penanggulangan Bencana Alam DPR RI		Tim	Belum ada pembahasan	
4.	1. Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan DPR tentang Kode Etik 2. Tata Beracara Badan Kehormatan		Badan Kehormatan	Belum ada pembahasan	